

Tinjauan Transaksi Kombinasi Bisnis Dengan Penerapan Standar Internasional Pelaporan Keuangan (IFRS) Pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.

Adisya Putri Nabilah^{1*}, Aulia Pasaribu², Atas Muda Harahap³

¹⁻³ Universitas Pembangunan Panca Budi

Email : adisyaputrinabilah06@gmail.com

Abstract: *The purpose of this study was to determine the review of business combination transactions with the application of International Financial Reporting Standards (IFRS) at PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. This research uses a descriptive qualitative approach by conducting a literature study. The descriptive method applied in this research is to provide an overview of the direction or process of research development. For each business combination, non-controlling interests are measured at fair value or at the proportion of non-controlling ownership of the identifiable net assets of the acquired entity. In this case, business combination transactions with IFRS (International Financial Reporting Standards) convergence have a relationship because they increase the information power of PT Telkom's corporate financial statements. The adoption of international standards is also very important in the context of economic stability. Adopting IFRS means that financial statements speak the same accounting language, this will make it easier for multinational companies to communicate with their branches in different countries, improve the quality of management reporting and decision making.*

Keywords: *Business Combination, Financial Statements, IFRS (International Financial Reporting Standards)*

Abstrak: Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Tinjauan Transaksi kombinasi bisnis dengan Penerapan Standar Internasional Pelaporan Keuangan (IFRS) Pada Pt Telekomunikasi Indonesia Tbk. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan melakukan studi literatur. Metode deskriptif yang diterapkan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang arah atau proses perkembangan penelitian. Untuk setiap kombinasi bisnis, kepentingan nonpengendali diukur pada nilai wajar atau pada proporsi kepemilikan nonpengendali atas aset neto teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Dalam hal ini transaksi kombinasi bisnis dengan konvergensi IFRS (Internasional Financial Reporting Standar) memiliki hubungan karena meningkatkan daya informasi dari laporan keuangan perusahaan PT. Telkom. Adopsi standar internasional juga sangat penting dalam rangka stabilitas perekonomian. Dengan mengadopsi IFRS berarti laporan keuangan berbicara dengan bahasa akuntansi yang sama, hal ini akan memudahkan perusahaan multinasional dalam berkomunikasi dengan cabang-cabang perusahaannya yang berada dalam negara berbeda, meningkatkan kualitas pelaporan manajemen dan pengambilan keputusan.

Kata Kunci: *Kombinasi Bisnis, Laporan Keuangan, IFRS (Internasional Financial Reporting Standar)*

PENDAHULUAN

Indonesia saat ini merupakan salah satu negara G20 yang telah mengadopsi IFRS dengan level yang sama atau sebanding. Dengan demikian, adopsi IFRS dapat diartikan sebagai perubahan pedoman akuntansi nasional agar sejalan dengan IFRS. Konvergensi standar akuntansi dapat terjadi terutama dalam dua cara: adopsi langsung IFRS dan penyesuaian yang lebih sederhana, seperti kepatuhan yang tidak terlalu lengkap dengan standar yang diakui secara internasional. Negara-negara cukup membuat standar akuntansi sendiri agar tidak bertentangan dengan standar akuntansi internasional (Koerniawan, 2020). Salah satu alasan penerapan standar IFRS mengatasi disparitas standar akuntansi antar negara yang menjadi penghambat investasi, yaitu ketika standar akuntansi internasional diterapkan, investor di negara lain akan lebih mudah bagi investor, calon investor, pemberi pinjaman, dan kreditor untuk memahami perusahaan dengan menggali informasi keuangan (Efferin & Rudiawarni, 2014).

Peran signifikan akuntansi dalam kombinasi bisnis terletak pada pengaruhnya terhadap laporan keuangan (Maimunah et al., 2016). Laporan konsolidasi, mencakup perusahaan induk dan anak perusahaan, wajib disampaikan dengan akurat untuk mencerminkan kombinasi bisnis. Jika suatu entitas mengendalikan bisnis lain, laporan konsolidasi diperlukan; jika tidak, laporan keuangan terpisah perlu diserahkan untuk setiap bisnis yang dimilikinya (Siregar, 2017). Semua bisnis wajib menghasilkan laporan keuangan konsolidasi. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyusun laporan keuangan mereka dengan cermat sesuai dengan standar PSAK 22 untuk memastikan kewajaran. Memenuhi kebutuhan perusahaan memerlukan komitmen untuk menerapkan standar akuntansi internasional, seperti IFRS (International Financial Reporting Standards), yang telah diterapkan secara nasional di Indonesia sejak 2008. (Ulya & Firmansyah, 2021).

Laporan keuangan merupakan hasil dari kinerja manajemen perusahaan dalam upaya mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya dan sumber dana yang dipercayakan kepada pihak manajemen untuk dikelola. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tahun 2015 menjelaskan bahwa laporan keuangan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Entitas induk tidak lagi hanya menyusun laporan keuangan tersendiri. Adanya konvergensi akan memudahkan akses pendanaan internasional menjadi lebih terbuka, karena laporan keuangan akan lebih mudah dikomunikasikan ke investor global. Konvergensi IFRS dapat meningkatkan daya informasi dari laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Sudah beberapa perusahaan di Indonesia yang telah menerapkan IFRS.

Sebagai salah satu perusahaan terkemuka di industri telekomunikasi Indonesia, PT Telekomunikasi Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam mengimplementasikan dan mematuhi perubahan regulasi tersebut. Sebagai perusahaan yang terdaftar di bursa, mereka dihadapkan pada tanggung jawab untuk mematuhi standar akuntansi yang berkembang, yang berdampak langsung pada pelaporan keuangan dan strategi bisnis mereka. Proses akuntansi kombinasi bisnis di perusahaan ini tidak hanya mencakup akuisisi dan penggabungan, tetapi juga mencerminkan dinamika industri yang cepat berubah dan permintaan yang semakin kompleks. Dengan ini penulis mengangkat judul penelitian “Tinjauan Transaksi kombinasi bisnis dengan Penerapan Standar Internasional Pelaporan Keuangan (IFRS) Pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk”.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Kombinasi Bisnis

Kombinasi bisnis adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses di mana dua entitas bisnis yang terpisah secara hukum menjadi satu entitas tunggal yang baru. Kombinasi bisnis dapat terjadi melalui merger (penggabungan), akuisisi, atau kemitraan antara dua perusahaan atau lebih. Tujuan dari kombinasi bisnis mungkin beragam, seperti untuk meningkatkan skala operasi, memperluas pasar, meningkatkan efisiensi, menciptakan nilai bagi pemegang saham, atau mengakses sumber daya atau teknologi baru. Proses kombinasi bisnis ini melibatkan banyak aspek, termasuk hukum, keuangan, operasional, dan strategi perusahaan (Maimunah & Darmawan, 2016).

Pengertian Lapaoran Keuangan

Menurut Friya Purwa Setya & Nursiftiyah (2020). Laporan keuangan merupakan suatu dokumen yang memuat informasi tentang kinerja keuangan suatu perusahaan atau entitas bisnis. Laporan keuangan biasanya mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan digunakan untuk mengevaluasi kesehatan keuangan suatu perusahaan, serta memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, dan pihak berwenang. Laporan keuangan juga dapat digunakan sebagai alat untuk membuat keputusan bisnis dan perencanaan keuangan.

Pengertian IFRS

Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) adalah aturan yang dibuat oleh International Accounting Standards Board (IASB) dan digunakan secara global dalam bidang akuntansi. IFRS merupakan seperangkat standar yang mengatur cara perusahaan mencatat dan mengungkapkan informasi keuangan mereka. Menurut Kurniati et al (2019), Penyesuaian dengan Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) membawa manfaat dalam hal perbandingan laporan keuangan dan meningkatkan tingkat transparansi. Dengan melakukan penyesuaian ini, laporan keuangan perusahaan Indonesia dapat dengan mudah dibandingkan dengan laporan keuangan perusahaan dari negara lain. Hal ini memungkinkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai kinerja perusahaan, memfasilitasi perbandingan yang lebih efektif, dan berpotensi meningkatkan kualitas Standar Akuntansi Keuangan.

Tujuan utama dari IFRS adalah untuk menciptakan konsistensi, transparansi, dan keberlanjutan dalam penyusunan laporan keuangan di seluruh dunia. Hal ini memungkinkan para pemangku kepentingan, seperti investor, kreditor, regulator, dan pihak berwenang lainnya, untuk membandingkan kinerja keuangan perusahaan dari berbagai negara dengan lebih mudah. IFRS mencakup berbagai aspek akuntansi, termasuk pengakuan pendapatan, penilaian aset, perlakuan laporan keuangan terhadap transaksi bisnis, serta penyajian informasi keuangan. Penggunaan IFRS membantu perusahaan untuk memenuhi persyaratan hukum dan regulasi di berbagai negara serta meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan melakukan studi literatur. Metode deskriptif yang diterapkan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang arah atau proses perkembangan penelitian sesuai dengan

objek penelitian yang digunakan (Sugiyono, 2017). Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder dan diperoleh secara tidak langsung, yaitu data atau informasi yang diambil dari artikel, buku, atau dokumen sebagai referensi yang dapat diperbaharui (Fadli & Humanika, 2021). Sumber data untuk penelitian ini berasal dari Google Scholar dan Scopus. Peneliti mengumpulkan data yang diperlukan yang berupa laporan tahunan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Dari laporan tahunan diatas kemudian dilakukan analisis kombinasi bisnis pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dengan menggunakan analisis deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah PT. Telkom Indonesia, Tbk.

PT. Telkom Indonesia, Tbk (Telkom) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. PT. Telkom juga menyediakan beragam layanan komunikasi lainnya termasuk layanan interkoneksi jaringan telepon, multimedia, data dan layanan terkait komunikasi internet, sewa transponder satelit, sirkuit langganan, televisi berbayar dan layanan VoIP. Telkom menguasai dan mendominasi lebih dari 60% pangsa pasar broadband di Indonesia yang mencapai lebih dari 19 juta pelanggan. Telkom Indonesia sendiri terbentuk pada tahun 1991 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1991. Berawal pada tahun 1882 didirikan badan usaha swasta penyedia layanan pos dan telegraf, lalu kemudian statusnya diubah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel) pada tahun 1961. Tahun 1965, kemudian PN Postel dipecah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Pos & Giro) dan Perusahaan Negara Telekomunikasi (PN Telekomunikasi). Perkembangan selanjutnya tahun 1974, dimana PN Telekomunikasi diubah menjadi Perusahaan Umum Telekomunikasi (Perumtel), lalu diubah lagi menjadi Perusahaan Perseroan Telekomunikasi Indonesia pada tahun 1991. Penawaran saham perdana PT. Telkom terjadi pada tahun 1995, dan sejak saat itu saham Telkom tercatat dan diperdagangkan pada Bursa Efek Jakarta & Bursa Efek Surabaya (kini bernama Bursa Efek Indonesia). Tidak hanya di Indonesia, saham Telkom juga diperdagangkan di bursa efek luar negeri seperti Bursa Efek New York dan Bursa Efek London. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah Pemerintah Republik Indonesia sebesar 52.09%, sedangkan 47.91% sisanya dikuasai oleh publik. Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode “TLKM” dan New York Stock Exchange (NYSE) dengan kode “TLK”. (Hari, 2020). Dalam pengoperasiannya di seluruh wilayah Indonesia, PT. Telkom Indonesia dibagi menjadi tujuh Divisi Regional (DIVRE), yaitu DIVRE I untuk wilayah Sumatera, DIVRE II untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, DIVRE III untuk wilayah Jawa Barat; DIVRE IV untuk wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta ; DIVRE V untuk wilayah Jawa Timur; DIVRE VI untuk wilayah Kalimantan; dan DIVRE VII untuk wilayah Indonesia bagian Timur.

Sebagai perusahaan digital telco milik negeri, tekad dan keyakinan tersebut dilambangkan dengan sebuah logo perusahaan sebagai image perusahaan yang terdiri dari bentuk lingkaran yang melambangkan kedinamisan Perusahaan dan juga simbolisasi dunia, serta tangan kanan yang ramah dalam meraih dunia tersebut. Dengan warna merah, putih, dan warna transisi abu-abu sebagai warna identitas perusahaan, sebagaimana warna merah dan putih yang menjadi identitas Indonesia. Logo Telkom Indonesia juga dilengkapi dengan tagline ‘The World in Your Hand’ dengan makna ‘Dunia dalam Genggaman Anda’ yang membawa pesan bahwa Telkom Indonesia berkomitmen untuk

membuat segalanya menjadi lebih mudah dan lebih menyenangkan dalam mengakses dunia.



Gambar 1: Logo PT. Telkom Indonesia, Tbk.

2. Ikhtisar Informasi Kebijakan Akuntansi Material Pada Laporan Keuangan Dan Kombinasi Bisnis

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas anak yang mana Perusahaan memiliki kendali. Pengendalian timbul ketika Grup terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investee. Secara spesifik, Grup mengendalikan investee jika dan hanya jika Grup memiliki kekuasaan atas investee, eksposur, atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee, dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investee untuk mempengaruhi imbal hasil.

Kombinasi bisnis dicatat dengan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan diukur sebesar nilai wajarnya, yang merupakan agregat dari nilai wajar aset yang dialihkan, liabilitas yang diambil alih, dan instrumen ekuitas yang diterbitkan sebagai pertukaran atas pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, kepentingan nonpengendali diukur pada nilai wajar atau pada proporsi kepemilikan nonpengendali atas aset neto teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Pilihan dasar pengukuran dibuat berdasarkan basis tiap transaksi. Biaya terkait akuisisi dicatat sebagai beban pada saat timbulnya. Aset dan liabilitas yang teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi diakui pada nilai wajar pada tanggal akuisisi.

Goodwill awalnya diukur pada harga perolehan, yang merupakan selisih lebih dari nilai agregat imbalan yang dialihkan dan nilai yang diakui oleh kepentingan nonpengendali dan nilai kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya, atas jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika nilai wajar dari jumlah neto aset yang diakuisisi melebihi nilai agregat imbalan yang dialihkan, Grup menilai kembali apakah semua aset yang diakuisisi dan liabilitas yang diambil alih sudah diidentifikasi dengan benar dan memeriksa prosedur yang digunakan untuk mengukur nilai yang harus diakui pada tanggal akuisisi. Jika hasil penilaian kembali tersebut masih menghasilkan selisih lebih atas nilai wajar dari aset neto diakuisisi atas nilai agregat imbalan yang dialihkan, maka keuntungan diakui pada laba atau rugi.

Saat penentuan imbalan dari kombinasi bisnis termasuk imbalan kontinjensi, imbalan kontinjensi ini diukur pada nilai wajar saat tanggal akuisisi. Imbalan kontinjensi diklasifikasikan sebagai ekuitas atau liabilitas keuangan. Jumlah yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan selanjutnya diukur kembali pada nilai wajar di mana perubahan pada nilai wajar tersebut diakui dalam laba rugi atau ketika penyesuaian dicatat di luar periode pengukuran. Perubahan pada nilai wajar imbalan kontinjensi yang memenuhi persyaratan sebagai penyesuaian periode pengukuran, disesuaikan secara retrospektif, dengan penyesuaian terkait terhadap goodwill. Penyesuaian periode pengukuran adalah penyesuaian yang timbul dari informasi tambahan yang didapat selama periode pengukuran, yang tidak boleh melebihi satu tahun dari tanggal akuisisi, tentang fakta dan kondisi yang ada pada saat tanggal akuisisi.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi bisnis terjadi, maka Grup akan melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangan konsolidasian. Selama periode pengukuran, Grup menyesuaikan secara retrospektif jumlah sementara yang diakui pada tanggal akuisisi untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, telah berdampak pada pengukuran jumlah yang diakui pada tanggal tersebut. Periode pengukuran berakhir segera setelah Perusahaan menerima informasi yang dicari tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi atau mempelajari bahwa informasi tambahan tidak dapat diperoleh. Namun demikian, periode pengukuran tidak boleh melebihi satu tahun dari tanggal akuisisi.

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, pihak pengakuisisi mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak diakuisisi pada nilai wajar saat tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan, jika ada, dalam laba rugi. Hal ini PT Telkom pada mulanya tidak mengizinkan untuk menggunakan metode pooling of interest apabila melakukan penggabungan usaha, karena dengan metode ini tidak dihasilkan taxable income atau objek pajak penghasilan. Pada metode ini jumlah harta, hutang dan hak para pemegang saham dicatat dan diakui sesuai dengan nilai bukunya. Timbul perbedaan apabila penggabungan ini menggunakan metode by purchase, akan timbul yang namanya keuntungan karena penggabungan usaha yang merupakan objek pajak penghasilan. Keuntungan ini disebabkan harta dan kekayaan yang diperoleh oleh suatu badan usaha yang melakukan pengambilalihan tersebut dicatat dan diakui sebesar nilai pasarnya.

Dalam hal ini transaksi kombinasi bisnis dengan konvergensi IFRS (Internasional Financial Reporting Standar) memiliki hubungan karena meningkatkan daya informasi dari laporan keuangan perusahaan PT. Telkom. Adopsi standar internasional juga sangat penting dalam rangka stabilitas perekonomian. Dengan mengadopsi IFRS berarti laporan keuangan berbicara dengan bahasa akuntansi yang sama, hal ini akan memudahkan perusahaan multinasional dalam berkomunikasi dengan cabang-cabang perusahaannya yang berada dalam negara berbeda, meningkatkan kualitas pelaporan manajemen dan pengambilan keputusan. Dengan mengadopsi IFRS juga berarti meningkatkan kepastian dan konsistensi dalam interpretasi akuntansi, sehingga memudahkan proses akuisisi dan divestasi dan juga dengan mengadopsi IFRS kinerja perusahaan dapat diperbandingkan dengan pesaing lainnya secara global, apalagi dengan semakin meningkatnya persaingan global saat ini.

3. Ringkasan Perbedaan Yang Signifikan Antara Psak Dan International Financial Reporting Standards (“IFRS”)

Di bawah ini disajikan ikhtisar perbedaan signifikan antara PSAK dan IFRS untuk tahun 2023. Dampak perbedaan antara PSAK dan IFRS atas pos - pos dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

	Referensi	PSAK	Rekonsiliasi	IFRS
ASET				
Piutang usaha - setelah dikurangi penyisihan kerugian kredit ekspektasian				
Pihak berelasi	b	1.918	439	2.357
Pihak ketiga	b	8.749	(439)	8.310
Aset lancar lainnya	d	7.996	15	8.011
Jumlah Aset Lancar		55.613	15	55.628
Aset tetap	a	180.755	(1.955)	178.800
Aset hak-guna	a,d	22.584	1.440	24.024
Aset pajak tangguhan	d	4.170	50	4.220
Jumlah Aset Tidak Lancar		231.429	(465)	230.964
JUMLAH ASET		287.042	(450)	286.592
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Utang usaha				
Pihak berelasi	b	585	2.405	2.990
Pihak ketiga	b	18.023	(2.405)	15.618
Liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam satu tahun	d	5.575	(117)	5.458
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		71.568	(117)	71.451
Liabilitas sewa	d	14.850	(6)	14.844
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		58.912	(6)	58.906
JUMLAH LIABILITAS		130.480	(123)	130.357
EKUITAS				
Tambahan modal disetor	c	2.711	(734)	1.977
Komponen ekuitas lainnya	c	9.639	(9.139)	500
Saldo laba	c	118.441	9.705	128.146
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	d	135.744	(168)	135.576
Kepentingan nonpengendali	d	20.818	(159)	20.659
JUMLAH EKUITAS		156.562	(327)	156.235
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		287.042	(450)	286.592

Sumber : Laporan Keuangan Konsolidasian 2023

Dampak perbedaan antara PSAK dan IFRS atas pos - pos dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

	Referensi	PSAK	Rekonsiliasi	IFRS
Beban penyusutan dan amortisasi	a,d	(32.663)	94	(32.569)
Penghasilan lain-lain - bersih	d	252	7	259
LABA USAHA		44.384	101	44.485
Biaya pendanaan	d	(4.652)	(40)	(4.692)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		40.794	61	40.855
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN		(8.586)	(201)	(8.787)
LABA TAHUN BERJALAN		32.208	(140)	32.068
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		30.754	(140)	30.614
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk		24.560	(133)	24.427
Kepentingan nonpengendali		7.648	(7)	7.641
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		32.208	(140)	32.068
Pemilik entitas induk		23.083	(134)	22.949
Kepentingan nonpengendali		7.671	(6)	7.665
LABA PER SAHAM DASAR		30.754	(140)	30.614
(dalam jumlah penuh)				
Laba bersih per saham		247,92	(1,34)	246,58
Laba bersih per ADS (100 saham Seri B per ADS)		24.792,50	(134,26)	24.658,24

Sumber : Laporan Keuangan Konsolidasian 2023

a. Hak Atas Tanah

Berdasarkan PSAK, hak atas tanah dicatat sebagai bagian dari aset tetap dan tidak diamortisasi kecuali terdapat bukti yang mengindikasikan bahwa perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah kemungkinan besar atau pasti tidak diperoleh. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah mana yang lebih pendek. Berdasarkan IFRS, hak atas tanah dicatat sebagai sewa pembiayaan dan disajikan sebagai bagian dari aset hak-guna. Hak atas tanah diamortisasi selama masa sewa.

b. Transaksi Dengan Pihak Berelasi

Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten, atau Perusahaan Publik, entitas berelasi dengan pemerintah merupakan entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi oleh suatu pemerintahan. Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham dari entitas. Berdasarkan IFRS, entitas berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh suatu pemerintahan. Pemerintah dalam hal ini mengacu pada pemerintah, instansi pemerintah dan lembaga sejenis baik lokal, nasional, maupun internasional.

c. Selisih Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali

Berdasarkan PSAK, selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali masuk ke dalam kelompok tambahan modal disetor di ekuitas. Sementara berdasarkan IFRS, selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali masuk ke dalam kelompok saldo laba.

d. Perbedaan Waktu Penerapan Standar Akuntansi

Grup menerapkan PSAK 73 Sewa mulai tanggal 1 Januari 2020. Penerapan tersebut setara dengan standar akuntansi IFRS 16 Leases yang diimplementasikan mulai tanggal 1 Januari 2019. Perbedaan waktu penerapan standar akuntansi menyebabkan perbedaan di beberapa akun pada laporan keuangan konsolidasian.

KESIMPULAN

PT. Telkom Indonesia, Tbk (Telkom) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas anak yang mana Perusahaan memiliki kendali. Pengendalian timbul ketika Grup terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investee. Kombinasi bisnis dicatat dengan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan diukur sebesar nilai wajarnya, yang merupakan agregat dari nilai wajar aset yang dialihkan, liabilitas yang diambil alih, dan instrumen ekuitas yang diterbitkan sebagai pertukaran atas pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, kepentingan nonpengendali diukur pada nilai wajar atau pada proporsi kepemilikan nonpengendali atas aset neto teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Dalam hal ini transaksi kombinasi bisnis dengan konvergensi IFRS (Internasional Financial Reporting Standar) memiliki hubungan karena meningkatkan daya informasi dari laporan keuangan perusahaan PT. Telkom. Adopsi standar

internasional juga sangat penting dalam rangka stabilitas perekonomian. Dengan mengadopsi IFRS berarti laporan keuangan berbicara dengan bahasa akuntansi yang sama, hal ini akan memudahkan perusahaan multinasional dalam berkomunikasi dengan cabang-cabang perusahaannya yang berada dalam negara berbeda, meningkatkan kualitas pelaporan manajemen dan pengambilan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Efferin, S., & Rudiawarni, F. A. (2014). Memahami Perilaku Stakeholders Indonesia dalam Adopsi IFRS: Tinjauan Aspek Kepentingan, Bahasa, dan Budaya. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 11(2), 138–164.
- Fadli, M. R., & Humanika. 2021. Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, ISSN: 1412-1271 (p); 2579-4248 (e). Vol. 21. No. pp. 33-54.
- Friya Purwa Setya, Y., & Nursiftiyah. (2020). Implementasi Akuntansi Kombinasi Bisnis Sebelum dan Setelah Penerapan PSAK 22 pada Perusahaan Subsektor Telekomunikasi di Indonesia.
- Koerniawan, I. (2020). Pengantar Akuntansi. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 1–275.
- Kurniati, E., Dani, R., Hidayat, A., & Siregar, N. O. (2019). Analisis Perbedaan Manajemen Laba Sebelum dan Sesudah Penerapan PSAK Konvergensi IFRS. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 13–22. <https://doi.org/10.31294/moneter.v6i1.4642>
- Maimunah, S., Darmawan, A., & Maimunah, S. (2016). INDONESIA TENTANG KOMBINASI BISNIS PADA LAPORAN KEUANGAN PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK PERIODE 2012-2014 dianggap sebagai tujuan entitas bisnis . laporan keuangan yang memberikan dengan Keerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuanga. 2(1), 23–45.
- Maimunah, S., F.A. Darmawan. 2016. “Analisis Penerapan Prinsip Penyajian dan Pengungkapan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia tentang Kombinasi Bisnis Pada Laporan Keuangan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Periode 2012-2014.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*. Vol. 2, No 1, ed. 1, h. 23-45. www.jurnal.unpak.ac.id.
- Profil Telkom Indonesia,” PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., 2020. https://www.telkom.co.id/sites/about-telkom/id_ID/page/profil-dan-riwayat-singkat-22
- Siregar, R. (2017). Akuntansi Keuangan Lanjutan 1.
- Sugiyono, (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.
- Ulya, N. M., & Firmansyah, A. (2021). Implementasi Akuntansi Kombinasi Bisnis Sebelum Dan Setelah Adopsi IFRS Pada Perusahaan Sektor Konsumsi Di Indonesia. *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)*, 6(1), 279–288. <https://doi.org/10.32528/jiai.v6i1.5064>